

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Rp 337 Miliar tak Terserap
Entitas / Cakupan	: Kota Cimahi
Sumber / Hal	: Radar Bandung/Hal.4
Edisi	: Selasa, 9 Januari 2018

## Rp 337 Miliar tak Terserap

**CIMAHI** – Masalah pengadaan lahan menjadi kendala Pemerintah Kota Cimahi dalam memaksimalkan penyerapan anggaran tahun 2017 lalu. Tahun depan, Ajay meminta seluruh SKPD menggenjot kinerja agar kendala serupa bisa diatasi.

Walikota Cimahi, Ajay M Priatna, mengatakan, Anggaran yang tidak terserap akan masuk dalam sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa), ada juga dampak efisiensi anggaran dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Untuk tahun 2018 kita berupaya Silpa tidak terlalu besar,” kata Ajay, kemarin.

Menurutnya, masalah pengadaan lahan saat ini menjadi kendala dalam penyerapan anggaran, diantaranya berada di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan dan Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah.

“Pengadaan tanah kendalanya

banyak, karena persoalan teknis. Kita tidak bisa menetapkan harga sesuka hati karena ada aturannya,” ungkapnya.

Ajay menambahkan, dalam hal ini dirinya baru menjabat Walikota Cimahi tertanggal 22 Oktober 2017 sehingga, sebagian besar kegiatan sudah mulai berlangsung. Namun, dirinya menargetkan tahun 2018 penyerapan bisa ditingkatkan. Terlebih, merupakan murni anggaran pertama semasa menjabat Walikota.

Agar penyerapan anggaran bisa dimaksimalkan, menurutnya, jelas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), harus lebih ditingkatkan. Terutama dalam menjalankan program kerja yang optimal.

“Intinya, bagaimana program berjalan dengan optimal dan masyarakat merasakan hasilnya,” ucapnya.

Selain itu, yang harus diperhatikan adalah bagaimana proses lelang harus diupayakan



dipercepat.

“Saya sudah disampaikan soal target ini ke seluruh SKPD,” katanya.

Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi mencatat, Silpa Pemkot Cimahi hingga 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 337 miliar lebih. Kemudian, Anggaran Penda-

patan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2017 yang terserap mencapai 77%.

Kepala BPKAD Kota Cimahi Hella Haerani mengatakan, Silpa anggaran tersebut masih bisa berubah sebab, sampai saat ini masih ada SKPD yang menyampaikan Buku Kas Umum (BKU).

“Laporannya belum final,

sehingga silpa masih bergerak,” katanya.

Ia pun mendorong agar, seluruh SKPD menyampaikan laporan BKU tahun anggaran 2017 sampai akhir Januari 2018 sebab, jika tidak segera menyerahkan BKU, maka Uang Persediaan (UP) tidak bisa dicairkan.

“Mudah-mudahan pada minggu ini laporannya selesai. Kita tidak bisa mengeluarkan UP kalau SKPD belum menyelesaikan BKU,” ujarnya.

Sebenarnya SILPA sebesar Rp 337 miliar itu, lanjut dia, dikarenakan pengadaan lahan yang belum terealisasi. Selain beberapa daerah di wilayah kecamatan Cimahi Selatan, pengadaan lahan juga dibutuhkan di wilayah Kecamatan Cimahi Utara yakni daerah Cimenteng.

“Karena konturnya daerah pegunungan, maka di Cimenteng nantinya untuk RTH (ruang terbuka hijau),” pungkasnya. (gat)